KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi APBNP 2016 - Sinyal Positif dari Senayan
Tanggal : Jumat, 05 Agustus 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 1

REVISI APBNP 2016

Sinyal Positif dari Senayan

JAKARTA — DPR memberi sinyal positif terhadap rencana pemerintah untuk memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 agar lebih rasional.

Arys Aditya, Dewi A. Zuhriyah & Veronika Yasinta
redaksi@bisnis.com

Meski dikhawatirkan bakal menyebabkan molornya pembahasan RAPBN 2017, sejumlah anggota DPR tampaknya mengambil sikap terbuka terhadap upaya pemerintah untuk menurunkan target APBNP 2016 yang dinilai terlalu ambisius.

Anggota Badan Anggaran DPR Johnny G Plate, misalnya, menganggap keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memangkas APBNP 2016 sebesar Rp133 triliun cukup rasional.

"Itu keputusan yang rasional. Kami juga dulu keberatan dengan asumsi makro dan postur APBNP 2016 yang pada saat pembahasannya kami nilai terlalu optimistis dan kurang kredibel. Karenanya kami sepakat dengan Menkeu," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (4/8).

Menurutnya, pemangkasan belanja Rp133 triliun adalah angka yang wajar mengingat adanya tekanan dalam penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

Senada dengan Johnny, Wakil Ketua Komisi XI Hafiz Thohir juga sepakat dengan kebijakan tersebut. Menurut Hafiz, adanya pemangkasan APBNP 2016 dilandasi oleh bermasalahnya kondisi fiskal saat ini.

"Revisi APBNP lebih dari satu kali tidak masalah. Ini karena UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang tidak mengatur batas pelaksanaan revisi. Bisa [revisi] beberapa kali, sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Tapi revisi APBN yang berkali-kali itu akan menunjukkan kredibilitas pemerintah yang lemah," tukasnya.

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan pun mengamini hal itu. "Meski demikian, usai reses, komisi XI akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk meminta alasan revisi."

Adapun anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun mewanti-wanti pemerintah, revisi APBNP berpeluang menyebabkan pembahasan RAPBN 2017 molor karena waktu yang tersita membahas revisi tersebut.

"Keputusan ini [revisi] akan berpengaruh terhadap kredibilitas Presiden. Kalau pemerintah mau serius ayo kita bahas secara hati-hati perhitungannya, sebenarnya penerimaan pajak akan seperti apa dan belanja negara akan sampai berapa persen serapannya."

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2017 di hadapan wakil rakyat pada 16 Agustus 2016, berbarengan dengan pidato kenegaraan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pun tak menampik jika keputusan untuk mengubah kembali APBNP akan menuai sejumlah dampak terutama pandangan pasar atas sikap konsistensi pemerintah.

BELANJA INFRASTRUKTUR

Pemerintah sendiri memastikan tidak akan mengutak-atik belanja infrastruktur yang telah masuk fase kontrak untuk memuluskan rencana pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun dalam revisi APBN Perubahan 2016 yang sudah diketok akhir Juni.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan pemotongan APBNP 2016 akan menyasar efisiensi di ruang belanja operasional yang tidak prioritas. "Jadi tidak memotong hal-hal yang memang sudah menjadi prioritas pemerintah seperti infrastruktur," katanya setelah menutup World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12, Kamis (4/8).

Dia menjelaskan penyesuaian juga tidak akan meningkatkan defisit di atas ketentuan regulasi maksimal 3%. "UU APBNP-nya sudah sangat jelas jadi kami akan lakukan apa yang memang bisa dilakukan."

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro pun menyatakan pemerintah cenderung melihat ke belanja yang tidak tereksekusi atau anggaran yang kerap tidak terserap. Tahun lalu, ada sekitar 10% anggaran yang tidak terserap.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual menjabarkan, dengan kondisi global yang masih belum pulih, laju pertumbuhan ekonomi memang benar-benar tergantung pada performa pemerintah dalam mengakselerasi belanja.

Meski demikian, pemerintah tidak merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam revisi APBNP 2016. Kemarin, pemerintah bersama Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional tentang pengendalian inflasi daerah.

Dalam jangka menengah, David menilai perlu ada reformulasi terhadap batas atas defisit anggaran. Menurutnya, limitasi defisit fiskal sebesar 3% tidak memadai lagi bagi pemerintah untuk mengeksekusi langkah-langkah *counter-cyclical* terhadap ekonomi domestik ketika kondisi global terus memburuk.

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo meyakini pemerintah tengah berhati-hati atas dampak dari perkembangan ekonomi dunia. "Kami masih harus lihat bagaimana detailnya. Menurut saya itu kebijakan yang baik. Kami yakin itu ciptakan *confidence* pasar."

(Kurniawan A. Wicaksono/Fauzul Muna)



Bisnis/Abdullah Azzam

Presiden Joko Widodo (*tengah*) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (*kiri*) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis (4/8).

Asumsi Dasar Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp/US$)
APBN	5,3	4,7	13.900
APBNP	5,2	4,0	13.500
Revisi	5,2	4,0	13.300

	Harga Minyak Mentah (US$/Barel)	*Lifting* Minyak Bumi (Ribu Barel/Hari)	*Lifting* Gas Bumi (Ribu Barel setara Minyak/Hari)
APBN	50	830	1.155
APBNP	40	820	1.150
Revisi	?*	?*	?*

*) Belum disampaikan oleh Menkeu

Antisipasi RAPBN 2017

- Penerimaan negara masih mengalami penurunan seiring dengan tekanan harga komoditas, seperti minyak dan gas, batu bara, kelapa sawit, dan pertambangan lainnya.
- Sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDB menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan, seperti manufaktur, perdagangan, dan konstruksi yang tercermin dari volume aktivitas.
- Potensi berlanjutnya gelombang tekanan dari kontraksi perdagangan dunia yang pada gilirannya akan memperlemah aktivitas ekspor dan impor Indonesia.

Sumber: Kemenkeu, Pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Diolah

BISNIS/RADITYO EKO

PERPUSTAKAAN DPR-RI